

Dampak Kenaikan Inflasi Terhadap Kemiskinan Ekstrem dan Strategi Penanggulangannya Di Kabupaten Bandung

Author:

Anindita Primastuti¹, Jatnika Dwi Asri²

Afiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Desa No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363¹²

Email:

anindita@ipdn.ac.id¹, jatnika@ipdn.ac.id²

ABSTRACT

There are at least four problems currently facing the people of Bandung Regency, including stunting, extreme poverty, inflation, and waste. This study aims to analyze the impact of rising inflation on poverty rates in Bandung Regency and to analyze the poverty alleviation strategies implemented by the Bandung Regency government. This study uses a descriptive qualitative approach, with data sources from interviews supported by related document studies. The results of the study indicate that rising inflation can drive up poverty rates because spending on minimum needs for the extremely poor becomes unaffordable. Meanwhile, the strategies implemented by the Bandung Regency Government are; 1. Increasing Community Income; 2. Reducing the Expenditure Burden of Poor Households; 3. Reducing Pockets of Poverty; 4. Organizing Integrated Program Governance. Practically, the results of this study can be a consideration for local governments in formulating strategies to alleviate extreme poverty. In addition, this research also provides scientific contributions to the literature that focuses on poverty alleviation and local economic development.

Keywords: *Extreme Poverty, Inflation, Poverty alleviation, Strategies*

ABSTRAK

Setidaknya ada empat permasalahan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung di antaranya adalah masalah stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, dan permasalahan sampah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dampak kenaikan inflasi terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Bandung dan juga untuk menganalisa strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data dari hasil wawancara didukung dengan studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan inflasi dapat mendorong kenaikan angka kemiskinan karena pengeluaran untuk kebutuhan minimum masyarakat miskin ekstrem menjadi tidak terjangkau. Sementara strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah; 1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat; 2. Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin; 3. Mengurangi Kantong Kemiskinan; 4. Menata Tata Kelola Program Secara Terpadu. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi

penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah pada literatur yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Kemiskinan ekstrem, inflasi, penanggulangan kemiskinan, strategi

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang ingin diatasi oleh berbagai negara di dunia, artinya mayoritas negara-negara di dunia baik yang sudah maju terlebih lagi yang belum maju masih memiliki penduduk miskin. Kemiskinan harus diatasi karena dapat berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, timbulnya konflik sosial, mempersempit akses terhadap pendidikan, sampai pada masalah kesehatan masyarakat.

Tingkat kemiskinan Indonesia menduduki peringkat ke enam jika disandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 adalah 8,47%, turun dari 8,57% pada September 2024. Ini berarti ada sekitar 23,85 juta orang miskin, dengan pengeluaran di bawah Rp 609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp 20.305 per hari. (Sumber: Kompas.com)

Di Indonesia sendiri, selain kemiskinan ada kemiskinan ekstrem. Mengutip laman Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat 0,85%, yang setara dengan sekitar 2,38 juta jiwa. Angka ini merupakan penurunan dari periode sebelumnya berkat upaya pemerintah dalam memperbaiki data dan menyalurkan bantuan sosial. Namun, perlu dicatat bahwa jika menggunakan standar baru Bank Dunia sebesar USD3 per kapita per hari, angkanya bisa jauh lebih tinggi. (Sumber: bps.go.id)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut bahwa tren penurunan angka kemiskinan ekstrem terjadi semenjak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2022 diterbitkan. Ia berpendapat, setelah penanganan kemiskinan dipisah dari kemiskinan ekstrem, kementerian dan lembaga yang terlibat bisa lebih fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem (Sumber: www.bps.go.id).

Selain masalah kemiskinan, inflasi juga merupakan salah satu masalah yang harus ditanggulangi oleh suatu negara. Hal ini bukan tanpa alasan, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Barro:1995). Selain itu penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil ini didukung dengan adanya teori bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan (Ningsih &

Andiny : 2018).

Menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna, setidaknya ada empat permasalahan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung. Adapun masalah tersebut di antaranya adalah masalah stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, dan permasalahan sampah. Hal tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna usai mengukuhkan Pengurus Unit Korpri OPD dan Kecamatan se-kabupaten Bandung dan Rapat Koordinasi Bulanan Istimewa di Gedung Mohammad Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa, 25 Juni 2024. (Pikiran Rakyat.com, 2024).

Fokus utama Pemerintah Kabupaten Bandung adalah menghilangkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung menurun sebesar 0,3% pada tahun 2022, dari semula 1,78% di tahun 2021 menjadi 1,48% di tahun 2022. (Detik.com, 2022).

Namun demikian, inflasi juga merupakan salah satu masalah yang harus ditanggulangi oleh Kabupaten Bandung karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Barro:1995). Selain itu penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia karena inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan (Ningsih & Andiny, 2018). Inflasi berdampak lebih besar pada kelompok miskin, terutama karena kenaikan harga bahan pangan. Dampak ini berbeda antarwilayah (rural vs urban) dan antar kelas pengeluaran (Paul & Sharma, 2019). Hal ini menunjukkan adanya gap empirik terkait dampak inflasi terhadap kemiskinan.

Terkait strategi penanggulangan kemiskinan, meski semua pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem namun strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Seperti strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun yang memiliki tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. (Wisnutama, Pramono, & Haryanto, 2023). Sementara Pemda Jawa Timur mengandalkan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan ekstrem (Fatikhurriszqi & Kurniawan, 2022), Pemerintah Kabupaten Karawang justru melakukan *Capacity Building* Dinas Sosial (Pratama, Hidayat & Azizah, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem antar daerah. Perbedaan pendekatan ini membuka ruang analisis empiris (gap empirik) mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung merespons dampak inflasi dan merumuskan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak kenaikan inflasi terhadap kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung; dan (2) mengkaji strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena dampak inflasi terhadap kemiskinan ekstrem serta strategi kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah. Fokus pada penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid dan Ahmad, 2010).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi pejabat pemerintah daerah terkait penanggulangan kemiskinan serta masyarakat yang tergolong miskin ekstrem. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan Badan Pusat Statistik, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2018). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan Inflasi Terhadap Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bandung

Sebelum membahas dampak kenaikan Inflasi terhadap kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung, perlu dipahami dulu gambaran inflasi pada Kabupaten Bandung. Penyebab utama terjadinya inflasi di Kabupaten Bandung adalah naiknya harga pangan dan energi, dimana keduanya merupakan kebutuhan pokok.

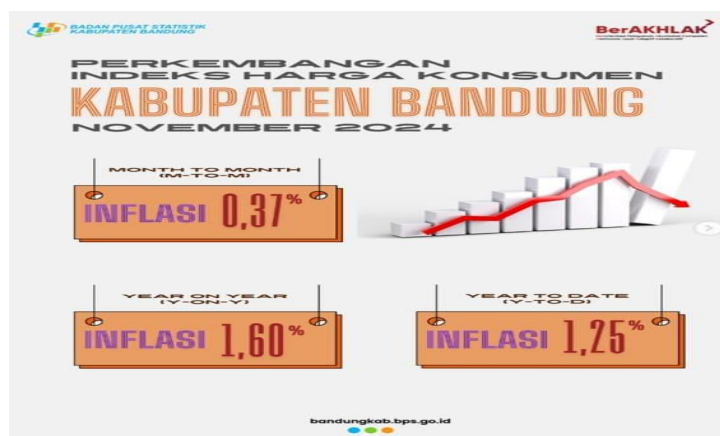
Kenaikan harga bahan pangan sendiri itu sendiri dipicu karena adanya perayaan hari besar keagamaan. Berdasarkan laporan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bandung diketahui bahwa pada tahun 2023 terjadi kenaikan Inflasi menjelang Idul Fitri antara bulan Maret sampai dengan Mei. Inflasi mulai naik dari Maret minggu III sebesar -0,23% dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya di Mei minggu II (3,366%). Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri 2023, terutama pada bahan pangan seperti beras, daging, dan minyak goreng.

Kemudian inflasi kembali mengalami kenaikan menjelang Idul Adha tahun 2023 yaitu pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Inflasi meningkat pada Juni minggu IV (0,342%) dan mencapai puncaknya di Juli minggu II (0,584%). Penyebab utama adalah meningkatnya permintaan daging sapi dan kambing untuk kebutuhan kurban Idul Adha.

Inflasi berikutnya di tahun 2023 terjadi menjelang akhir tahun sekitar bulan Oktober – Desember. Inflasi mengalami tren kenaikan sejak Oktober minggu III (0,500%), lalu melonjak signifikan di November minggu V (3,427%) dan bertahan tinggi hingga Desember minggu II (2,309%). Penyebab utama adalah peningkatan permintaan bahan pokok menjelang liburan akhir

tahun dan Natal.

Pada tahun 2024 juga tidak menunjukkan hal yang jauh berbeda dengan tahun 2023, dimana bahan pangan dan energi masih menjadi penyebab utama inflasi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data bandungkab.bps.go.id, pada November 2024 Kabupaten Bandung mengalami inflasi sebesar 0,37 persen dengan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,25 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,31 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen. Tingkat inflasi tahun kalender November 2024 sebesar 1,25 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2024 terhadap November 2023) sebesar 1,60 persen. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Perkembangan Inflasi Kabupaten Bandung November 2024

Pada bulan Maret 2025, Kabupaten Bandung mengalami inflasi untuk pertama kalinya setelah dua bulan sebelumnya secara berturut-turut mengalami deflasi imbas dari kebijakan diskon tarif listrik dari pemerintah. Tingkat inflasi Kabupaten Bandung secara bulanan sebesar 1,70 persen, sedangkan secara tahun kalender inflasi sebesar 0,16 persen dan secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,85 persen.

Penyumbang utama inflasi yaitu tarif listrik dengan andil sebesar 1,18 persen. Pada bulan Maret ini, tarif listrik kembali ke harga normal sehingga mengalami inflasi sebesar 54,09 persen. Selain itu, inflasi disebabkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan yang bertepatan dengan momen bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.



Gambar 2. Perkembangan Inflasi Kabupaten Bandung

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa inflasi di Kabupaten Bandung seringkali terjadi pada bahan pangan dan energi dimana keduanya merupakan kebutuhan pokok. Orang dalam kemiskinan ekstrem menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk makanan. Kenaikan harga bahan pangan secara langsung memperburuk kondisi mereka. Sebagaimana penelitian Paul & Sharma yang menemukan bahwa inflasi berdampak lebih besar pada kelompok miskin, terutama karena kenaikan harga bahan pangan. Dampak ini berbeda antarwilayah (rural vs urban) dan antar kelas pengeluaran (Paul & Sharma, 2019).

Salah satu dampak kenaikan inflasi adalah penurunan daya beli masyarakat. Karena inflasi membuat harga-harga barang naik, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara orang miskin ekstrem yang sudah hidup dengan penghasilan sangat minim menjadi semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar karena uang mereka tidak cukup untuk membeli barang/jasa yang semakin mahal.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pak Asep sebagai salah satu warga Kabupaten Bandung yang termasuk dalam kelompok miskin. Pak Asep adalah seorang Bapak dengan 3 orang anak yang bekerja serabutan yang penghasilannya tidak tetap. Dalam sebulan pendapatan Pak Asep hanya sekitar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000. Pak Asep mengatakan bahwa uang yang dia peroleh dari kerja serabutan diutamakan untuk membeli makanan sehari-hari, Pak Asep juga lebih memilih membeli makanan matang karena uangnya tidak cukup untuk membeli minyak goreng atau gas untuk memasak, menurutnya membeli makanan matang lebih hemat. (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 pukul 16.00 WIB). Jika harga kebutuhan pokok naik karena adanya inflasi maka masyarakat miskin seperti Pak Asep akan sangat terdampak. Makanan pun belum tentu terbeli apalagi jika harus membiayai kebutuhan hidup lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa inflasi harus segera dikendalikan oleh pemerintah setempat karena jika inflasi terjadi berkepanjangan sementara pendapatan masyarakat tidak naik seiring inflasi.

maka lebih banyak orang dapat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem karena pengeluaran untuk kebutuhan minimum menjadi tidak terjangkau.

Selain itu kenaikan harga karena inflasi juga berdampak pada biaya kesehatan dan pendidikan. Masyarakat miskin ekstrem terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan akses ke layanan-layanan penting ini. Maka pada jangka panjang kesehatan masyarakat miskin ekstrem akan memburuk disertai dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Hal ini juga dirasakan oleh bu Kasni salah satu masyarakat miskin yang mengatakan bahwa pendidikannya dan anak-anaknya hanya sampai sekolah menengah pertama (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025 pukul 14.40 WIB). Disinilah peran pemerintah sangat diandalkan, dimana masyarakat miskin ekstrem sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis dari pemerintah.

Orang miskin ekstrem biasanya tidak memiliki akses ke tabungan, asuransi, atau program bantuan sosial yang memadai karena pendapatan mereka tidak mencukupi untuk hal-hal tersebut, sehingga bisa terjadi ketimpangan akses terhadap mekanisme perlindungan sosial. Masyarakat yang pendapatannya menengah keatas dapat dengan mudah mengakses hal tersebut, sementara masyarakat miskin ekstrem kesulitan mengaksesnya.

Hasil studi yang dilakukan oleh Solihah, Karomah dan Astuti (2025) juga menunjukkan bahwa inflasi secara signifikan menurunkan daya beli rumah tangga karena harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Dampak ini paling dirasakan oleh rumah tangga miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi dasar. Selain itu, inflasi juga memperbesar ketimpangan pendapatan dan memicu penurunan kualitas hidup, khususnya dalam aspek gizi, pendidikan, dan kesehatan.

Kelompok miskin ekstrem di Kabupaten Bandung memiliki cadangan ekonomi yang sangat terbatas. Inflasi membuat mereka semakin rentan terhadap guncangan ekonomi, jika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga pangan dan energi hal ini bisa membuat mereka terdorong ke kondisi yang lebih buruk (misalnya kelaparan atau kehilangan tempat tinggal). Hal ini pada gilirannya akan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, karena kelompok miskin tidak memiliki aset atau investasi yang nilainya dapat mengikuti laju inflasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Bandung terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi, yang merupakan komponen utama pengeluaran rumah tangga miskin ekstrem. Kenaikan harga tersebut secara langsung menurunkan daya beli dan mempersempit kemampuan rumah tangga miskin ekstrem dalam memenuhi kebutuhan dasar. Inflasi juga berdampak pada meningkatnya kerentanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperlebar kesenjangan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Paul dan Sharma (2019) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak lebih besar pada kelompok miskin dibandingkan kelompok berpendapatan menengah dan atas.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang hingga kini masih membayangi pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Terkait dengan kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dalam sepuluh tahun terakhir namun dalam tiga tahun ini trennya menurun. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 6,04%, menurun 0,15% poin terhadap Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 236,06 ribu orang, menurun 3,81 ribu orang terhadap Maret 2024. Garis kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp. 468.974/kapita/bulan. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) pada Maret 2025 adalah sebesar 0,82 meningkat 0,21 poin terhadap Maret 2024. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) pada Maret 2025 adalah sebesar 0,18 meningkat 0,09 poin terhadap Maret 2024. (Sumber: bandungkab.bps.go.id)



Gambar 3. Profil Kemiskinan di Kabupaten Bandung Per Maret 2025

Meskipun data menunjukkan adanya penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2024 ke tahun 2025, namun kualitas kemiskinan, dilihat dari kedalaman dan keparahannya, justru menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan menunjukkan tren peningkatan, yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan antar kelompok miskin.

Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah bahwa program-program yang dilaksanakan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan perlu difokuskan kembali kepada kelompok miskin ekstrem agar intervensi lebih tepat sasaran.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung tidak berdiri sendiri, melainkan disusun dengan mengacu pada berbagai kerangka kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi. Kebijakan utama yang menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2023–2026 meliputi:

1. Permendagri No. 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung 2005–2025 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021–2026 yang menegaskan visi 'BEDAS' dan misi ke-5 yakni kesejahteraan masyarakat;
4. Peraturan Bupati No. 287 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2023–2026.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang bertugas mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan program kemiskinan di seluruh perangkat daerah. RPKD Kabupaten Bandung merumuskan empat pilar strategis yang menjadi kerangka utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Keempat pilar tersebut bertujuan tidak hanya menanggulangi dampak kemiskinan, tetapi juga menysasar akar penyebabnya. Keempat pilar tersebut adalah:

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
2. Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin
3. Mengurangi Kantong Kemiskinan
4. Menata Tata Kelola Program Secara Terpadu.

Masing-masing pilar diikuti oleh sasaran, indikator keberhasilan, serta rencana aksi yang melibatkan lintas perangkat daerah.

Model ini menekankan pendekatan holistik dalam upaya mengurangi angka dan kedalaman kemiskinan. Kabupaten Bandung menggunakan pendekatan spasial berbasis data untuk menentukan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan.

Sumber data utama berasal dari Peta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2023 dan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022. Dari pemetaan ini, ditentukan 31 kecamatan dengan tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan rendah sebagai sasaran utama. Namun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah fragmentasi data antar-perangkat daerah. Masih belum tersedia satu basis data terpadu *by-name by-address* berbasis NIK, sehingga intervensi seringkali tidak sinkron.

Pemerintah tengah mengembangkan sistem data kemiskinan terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh dinas secara real-time. Masing-masing pilar dalam strategi penanggulangan kemiskinan memiliki program-program unggulan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Berikut ini adalah rincian program berdasarkan empat pilar utama strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung:

- a) **Meningkatkan Pendapatan.** Program ini difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi. Kegiatan utama mencakup: 1. Pelatihan vokasi dan kewirausahaan berbasis potensi lokal; 2. Akses permodalan melalui KUR, UMi, dan dana bergulir BUMDes; 3. Revitalisasi sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Pangalengan dan Ciparay; 4. Modernisasi pasar tradisional dan penguatan koperasi desa. Sesuai penjelasan Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, H. Marlan, S. IP, M. Si, dalam rangka mendukung Program 100 hari kerja Bupati, saat ini telah dibuka Program Pelatihan Make Up Artist (MUA) untuk 1500 orang serta pelatihan bagi 500 orang calon tenaga kerja untuk diserap di industri manufaktur Jepang. Kedua program ini dianggarkan sebesar Rp 10 Miliar. KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Pembiayaan Ultra Mikro) adalah program pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung usaha mikro dan kecil, tetapi memiliki perbedaan dalam target penerima dan besaran pinjaman. KUR ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan lebih besar, sementara UMi diperuntukkan bagi usaha ultra mikro yang belum tersentuh pembiayaan perbankan. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Bandung Barat, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei 2024 telah mencapai Rp 413.000.454.682 yang disalurkan kepada lebih dari 10.938 debitur pada beberapa sektor, yaitu: sektor perdagangan besar dan eceran menerima 51,86% dari total penyaluran, sektor pertanian dan kehutanan menerima 19,40%, dan sektor industri pengolahan mendapatkan 13,14% (Pilar Pos, 2024). Selain memberikan akses permodalan berupa KUR dan Umi, Kabupaten Bandung Barat juga memberikan bantuan Dana Bergulir. Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, H. Marlan, S. IP, M. Si menyatakan bahwa:

“Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 dari 5,35% menjadi 4,97%. Hal ini disebabkan perlambatan industri dan produk tekstil, sebagaimana diketahui bahwa 90% industri di Kabupaten Bandung Barat merupakan industri tekstil. Selain itu banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) contohnya Pabrik Kahatex. Produk tekstil kita yang tidak dapat bersaing dengan produk tekstil dari China ditambah dengan adanya demo buruh yang menuntut kenaikan upah, sehingga banyak pabrik yang tutup dan pindah. Untuk mengurangi angka kemiskinan kami dari Pemda memberikan bantuan dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan untuk usaha, bunga disubsidi oleh Pemda. Daerah di Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat kemiskinan tinggi saat ini adalah Kecamatan Pacet dan Pangalengan yang merupakan wilayah perkebunan. Hal ini karena pertama, upah mereka di bawah Upah Minimal Regional (UMR), dan kedua, upah mereka di bawah batas minimal pendapatan per kapita orang miskin Rp. 600.000/bulan.”

Lebih lanjut, Kepala Bapperida Kabupaten Bandung menjelaskan bahwa di antara seluruh program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemda Kabupaten Bandung, program yang dinilai tingkat keberhasilannya paling tinggi adalah program Dana Bergulir, sedangkan program yang paling banyak kendalanya adalah program pada sektor pertanian. Seperti dijelaskan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Bandung sebagai berikut:

“Program pertanian menghadapi banyak kendala karena jumlahnya banyak dan susah untuk memilahnya. Dalam hal ini Dinas Pertanian yang melakukan pemilahan, karena saat ini jumlah pemilik lahan dan penggarap masih disatukan. Sedangkan untuk program dana bergulir sudah sekitar 33.000 warga yang menikmati dengan tingkat kemacetan kredit di bawah 5%. Saat ini nilai maksimal dana bergulir sekitar Rp 2 juta dan akan ditingkatkan menjadi Rp 10 juta dengan bantuan sistem seleksi channelling dengan bantuan pihak Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank Perekonomian Rakyat (dahulu BPR).”

Keberhasilan dana bergulir BUMDes ditunjukkan oleh BUMDes Niagara yang terletak di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya, sebelumnya meraih peringkat 2 BUMDes tingkat Jawa Barat dan akhirnya berhasil meraih peringkat 1 pada lomba BUMDes Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dengan kategori BUMDes Inspiratif. BUMDes Niagara menjalankan usaha pengelolaan simpan pinjam, pengelolaan pasar, mini soccer, perdagangan dan jasa umrah. Tercatat ada enam besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bandung. Selain BUMDes Niagara Desa Wangisagara, juga ada BUMDes Artha Guna Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya. BUMDes Artha Guna bergerak dalam usaha simpan pinjam, sewa sarana olahraga, jasa internet dan waterpark. BUMDes Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi dengan bidang usaha perdagangan dan jasa, pengelolaan sumur artesis, wisata, internet provider, dan pengelolaan sampah. BUMDes Marga Bhakti Persada Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu dengan kegiatan usaha pengelolaan sumber air bersih. BUMDes Wa Hyang Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari bergerak di bidang usaha BPAB, TIK Multimedia, jasa perdagangan, jasa keuangan, dan wisata. Terakhir, BUMDes Sugema Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, dengan kegiatan usaha perdagangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kantin dan Gedung Olahraga (Satumedia, 2025). Dalam hal modernisasi pasar tradisional, pada bulan Mei 2025 Pemda Kabupaten Bandung telah meresmikan Pasar Sehat Banjaran yang memiliki 1.978 unit kios dan lapak yang mampu mengakomodasi pedagang formal dan informal dengan lebih tertata dan layak. Sedangkan penguatan koperasi desa saat ini dengan dibentuknya Koperasi Kelurahan Merah Putih pada bulan Mei 2025 sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

- b) **Menurunkan Beban Pengeluaran.** Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan berbagai program subsidi dan bantuan sosial untuk meringankan pengeluaran masyarakat miskin, antara lain: 1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) daerah; 2.

Subsidi premi BPJS Kesehatan untuk warga miskin; 3. Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu); 4. Penyediaan akses air bersih, sanitasi layak, dan sambungan listrik gratis untuk desa tertinggal. Terkait program pengentasan kemiskinan yang kedua, yaitu menurunkan beban pengeluaran, Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, H. Marlan, S. IP, M. Si menyatakan bahwa:

“Tingkat kemiskinan ekstrim Kabupaten Bandung menurun dari sebelumnya Tahun 2023 sebesar 1,2% menjadi 0,5% pada Tahun 2024. Selain memberikan bantuan sosial Sembako (Sembilan Bahan Pokok), Pemda juga memberikan insentif untuk guru ngaji dan tenaga linmas (perlindungan masyarakat) sebesar Rp. 300.000 per bulan ditambah jaminan kesehatan (BPJS). Mulai Tahun 2023 upaya untuk menurunkan kemiskinan juga melalui pendidikan dengan memberi beasiswa Perguruan Tinggi kepada warga miskin yang salah satu syaratnya adalah minimal telah hafal minimal 1 juz Al-Quran. Program beasiswa ini dikenal dengan BESTI (Beasiswa ti Bupati) yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi seperti UIN Cibiru Bandung juga Universitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor yang saat ini sudah mencapai 200 mahasiswa penerima beasiswa. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi program PKH yang sudah berjalan dari Tahun 2008 sampai saat ini yang nilainya justru bertambah. Program bantuan kepada guru ngaji di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 sebesar Rp. 109 Miliar dengan tingkat keberhasilan 90% anak sudah bisa mengaji.”

Bantuan sosial dalam jangka panjang akan disalurkan dalam bantuan usaha yang bersifat pemberdayaan, tidak lagi bantuan langsung tunai kecuali untuk masyarakat yang rentan, seperti lansia, difabel, dan anak terlantar. Kabupaten Bandung menjalankan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dalam waktu 3,5 tahun pemda Kabupaten Bandung telah membangun 29.347 unit rutilahu dengan melibatkan beberapa pihak, seperti pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Baznas Kabupaten Bandung. Sedangkan dalam hal meningkatkan ketersediaan air layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Ciparay di Kabupaten Bandung pada bulan Februari 2025 (dsda.jabarprov.go.id, 2025). Groundbreaking pembangunan SPAM Ciparay dilakukan bersama Kementerian PU RI, Kabupaten Bandung, serta PDAM Kabupaten Bandung dan PT Moya sebagai investor. SPAM Ciparay diharapkan dapat menambah pasokan air sebanyak 500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan di enam kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bandung. Pembangunan SPAM Ciparay merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung target pemenuhan air minum layak dan perpipaan 100 persen pada tahun 2045. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, diharapkan akses air minum perpipaan semakin merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa program yang dijalankan di atas sejalan dengan

visi Bupati Bandung Barat tahun 2021-2026 yaitu BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera).

- c) **Mengurangi Kantong Kemiskinan.** Penanganan kemiskinan juga diarahkan secara geografis ke daerah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi. Kabupaten Bandung menetapkan 31 kecamatan sebagai lokasi prioritas tahap 2024–2026. Intervensi meliputi: 1. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan irigasi; 2. Program padat karya tunai; 3. Program Gerakan Bedas Desa sebagai integrasi pemberdayaan masyarakat dengan partisipasi langsung warga. Berdasarkan penjelasan Kepala Bapperida Kabupaten Bandung, H. Marlan, S. IP, M. Si, program pembangunan infrastruktur merupakan program baru yang saat ini difokuskan pada infrastruktur jalan dan sekolah. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Bandung sebagai berikut: “Saat ini infrastruktur difokuskan pada pembangunan jalan dan sekolah, sekolah akan didirikan menjadi 2 lantai karena banyak sekolah yang tidak mempunyai halaman dan area bermain anak sekolah sehingga sekolah akan dibangun menjadi 2 lantai.” Program selanjutnya adalah Gerakan Bedas Desa. Gerakan Bedas Desa di Kabupaten Bandung adalah inisiatif yang bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan desa-desa di wilayah tersebut. Gerakan ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa program unggulan dari Gerakan Bedas Desa antara lain:
- a. Kampung Bedas Literat (KABELAT): Meningkatkan minat baca masyarakat hingga tingkat RW.
 - b. Senam Bedas: Kegiatan senam yang melibatkan masyarakat desa dan perangkat daerah, bertujuan untuk memeriahkan berbagai acara dan mempererat tali silaturahmi.
 - c. Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa): Program kunjungan bupati ke desa-desa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memantau perkembangan desa.
 - d. Gebyar Pentas Kreasi Seni: Acara yang menampilkan berbagai potensi seni dan kreativitas masyarakat desa.
- Program-program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, dinas terkait, perangkat desa, dan masyarakat. Gerakan Bedas Desa merupakan upaya konkret pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan visi "Bandung Bedas" (Berdaya, Ekonomi, Sejahtera, Aman, dan Dinamis) di seluruh wilayahnya. Salah satu program inovatif dari Gerakan Bedas Desa adalah Kampung Bedas Literat (KABELAT). Program ini digagas oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung dengan mengusung pendekatan pentahelix melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. KABELAT menempatkan Bunda Literasi RW sebagai motor penggerak utama. Para bunda literasi didorong untuk mengembangkan pojok baca, menyelenggarakan kegiatan seperti mendongeng, pelatihan menulis, wisata literasi, hingga bazar buku murah. Program ini hadir sebagai solusi atas rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Bandung, yang pada 2024, serta keterbatasan pustakawan dan akses buku di tengah luasnya wilayah. Dengan 4.620 bunda literasi tersebar dari tingkat kabupaten hingga RW, KABELAT memanfaatkan potensi

lokal untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Dalam jangka pendek, program ini akan fokus pada pelatihan bunda literasi, pembentukan RW percontohan, dan penyusunan regulasi pendukung. Target jangka panjangnya adalah menjadikan Kabupaten Bandung sebagai model nasional literasi berbasis komunitas, serta meningkatkan IPLM di atas angka 85 dalam dua tahun ke depan. KABELAT juga sejalan dengan visi-misi Kabupaten Bandung, tema reformasi birokrasi, serta Asta Cita nasional dalam pengembangan SDM dan kesetaraan gender. Inisiatif ini telah mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk Telkom University, Penerbit Erlangga, dan organisasi masyarakat.

- d) **Menata Tata Kelola Terpadu.** Upaya reformasi tata kelola diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan program kemiskinan. Strateginya antara lain: 1. Penggunaan sistem tagging anggaran kemiskinan dalam e-Budgeting; 2. Pengembangan dashboard monitoring dan evaluasi berbasis NIK yang terintegrasi antar dinas; 3. Pelibatan sektor swasta dan lembaga filantropi melalui skema pembiayaan bersama (pentahelix financing). Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pendekatan kolaborasi pentahelix dalam tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan sektor swasta dan lembaga filantropi. Lembaga filantropi adalah organisasi yang beroperasi untuk memajukan kesejahteraan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan, seringkali dengan fokus pada pemberian bantuan, baik dalam bentuk dana, waktu, maupun tenaga, kepada mereka yang membutuhkan atau untuk tujuan amal. Lembaga filantropi bekerja untuk mengatasi berbagai masalah sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti PT. Metro Garmin dalam menangani permasalahan banjir, MoU dengan Asosiasi Pasia Tokyo Jepang untuk penyaluran tenaga kerja migran ke Jepang, Baznas Kabupaten Bandung dalam pembangunan Rumah Layak Huni (RHL), PT. Moya sebagai investor dalam pembangunan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bandung, serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti Telkom University, Penerbit Erlangga, Komunitas Bunda Literasi RW, Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam program KABELAT. Dalam menjalankan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang disampaikan oleh pejabat pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, antara lain: 1) Fragmentasi data antar OPD yang menyebabkan tidak sinkronnya sasaran program; 2) Ketidakterpenuhinya sistem tagging anggaran secara menyeluruh dalam sistem SIPD; 3) Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome (dampak) di tingkat rumah tangga; 4) Keterbatasan kapasitas fiskal yang menghambat alokasi belanja produktif secara lebih besar. Terkait fragmentasi data antar OPD dan lemahnya sistem monitoring seperti disampaikan oleh pejabat pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa:

“Saat ini untuk masalah data kami belum bersinergi secara penuh, karena program yang ditetapkan dari hasil musrenbang mempunyai kriteria teknis yang berbeda. Sebagai contoh,

seharusnya yang mendapatkan bantuan modal usaha konveksi berupa mesin jahit, adalah orang yang sudah pernah mengikuti pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja. Dinas Sosial memberi bantuan kepada masyarakat miskin namun Dinas Tenaga Kerja tidak hanya fokus ke masyarakat miskin. Oleh sebab itu TKPKD yang sekretarisnya ada di Bapperida harusnya aktif, padahal mereka juga sangat sibuk. Untuk monitoring kita dibantu oleh para pendamping yang jumlahnya sangat terbatas. Para pendamping harus melakukan monitoring dengan medan yang terkadang berat, dan dengan gaji yang kecil sekitar Rp 300.000 per bulan”.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kedepannya Kabupaten Bandung akan menetapkan indikator data yang sama, dengan menyusun Peraturan Gubernur sehingga sudah ditentukan dinas-dinas apa saja yang terikat dengan peraturan tersebut.

Namun demikian pelaksanaan strategi-strategi tersebut bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut;

- a. Keterbatasan akses data kemiskinan itu sendiri. Ketidakakuratan data kemiskinan menjadi penghalang dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan yang efektif, karena data yang berbeda dapat menyebabkan intervensi yang kurang tepat sasaran;
- b. Kondisi geografis yang menantang, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, juga dapat menjadi tantangan dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
- c. Tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi kemakmuran hidup masyarakat karena pendapatan mereka berkurang. Pengangguran juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan karena masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka;
- d. Keterbatasan anggaran, sehingga penerima program belum mencakup keseluruhan keluarga miskin. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya untuk melaksanakan Program secara berkelanjutan dan bergilir sehingga semua keluarga miskin dapat manfaat dari program-program tersebut.

Strategi yang dijalankan oleh Kabupaten Bandung dalam penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan cukup baik karena sudah mengupayakan peningkatan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian beberapa strategi perlu ditambahkan seperti menghilangkan hambatan sosial dan pemberdayaan Perempuan sebagaimana yang pernah disarankan oleh World Bank (Salmen, 1942) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di benua Afrika yang menyatakan bahwa:

Reducing poverty in the continent will require a growth in incomes, and to redistribute income from broad-based strategy that addresses poverty both as the rich to the poor; an economic and as a social phenomenon. In particular, four key elements are on the critical path to effective poverty reduction in the continent. First, effective poverty reduction will depend on the success of

the macroeconomic reform programs presently being undertaken in the continent to generate growth, and to spread the benefits of that growth to the poor. Second, poverty reduction programs must aim at removing the social barriers that prevent the poor from effectively participating in socioeconomic activity. Third, with food security seriously threatened or still fragile in most countries of the continent, ensuring access for all people to adequate food at all times is critical to achieve poverty reduction. Fourth, with women constituting the majority of the poor in Africa, effective poverty reduction will depend on programs aimed at enabling women to secure their importantly, to advance the cause of sustainable and economic and social rights

Strategi yang disarankan world bank dalam penanggulangan kemiskinan di Afrika adalah; Pertama, pengurangan kemiskinan yang efektif akan bergantung pada keberhasilan program reformasi ekonomi makro yang saat ini sedang dijalankan di benua ini untuk mendorong pertumbuhan, dan menyebarkan manfaat pertumbuhan tersebut kepada masyarakat miskin. Kedua, program pengurangan kemiskinan harus bertujuan untuk menghilangkan hambatan sosial yang menghalangi masyarakat miskin berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan sosial-ekonomi. Ketiga, dengan ketahanan pangan yang sangat terancam atau masih rapuh di sebagian besar negara di benua ini, memastikan akses bagi semua orang terhadap pangan yang cukup setiap saat sangat penting untuk mencapai pengurangan kemiskinan. Keempat, dengan perempuan yang merupakan mayoritas penduduk miskin di Afrika, pengurangan kemiskinan yang efektif akan bergantung pada program-program yang bertujuan untuk memungkinkan perempuan mengamankan hak-hak mereka, yang terpenting, untuk memajukan perjuangan hak-hak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil studi lapangan dan membandingkan dengan studi literatur, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan dan juga merupakan novelty dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mendalam tentang profil kemiskinan. Sebelum merumuskan strategi, perlu dipahami siapa yang miskin dengan mempelajari karakteristik rumah tangga, jenis pekerjaan, pendidikan, usia, dan gender. Perlu juga diketahui di mana kemiskinan terkonsentrasi, apakah di wilayah desa/kota, pesisir, perdesaan terpencil, atau perkotaan padat. Selanjutnya untuk melengkapi profil kemiskinan perlu juga memahami jenis kemiskinan yang dominan, apakah kemiskinan tersebut termasuk kemiskinan struktural, kultural, atau kemiskinan sementara (*transient*);
2. Menganalisis penyebab utama (*root causes*) karena strategi tidak boleh hanya menysar gejala. Oleh karena itu perlu analisis apa yang menjadi penyebab utama kemiskinan apakah karena kesulitan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, rumah layak. Apakah karena ketiadaan kesempatan kerja dan struktur ekonomi lokal. Bisa juga karena faktor sosial (budaya, norma, gender, dan diskriminasi) dan faktor institusional (birokrasi, koordinasi, tata kelola);

3. Data yang akurat dan terverifikasi. Basis data seperti DTKS, P3KE, atau data lokal harus diperiksa ketepatannya. Validasi lapangan dan pemutakhiran data agar tidak terjadi *exclusion error* dan *inclusion error*. Pemanfaatan data spasial dan *poverty mapping*;
4. Ketersediaan sumber daya (*resource assessment*). Kapasitas anggaran pemerintah (*fiscal space*). Kapasitas kelembagaan (SDM, koordinasi lintas sektor, kualitas implementasi). Dukungan dari masyarakat, swasta, dan lembaga non-pemerintah;
5. Analisis risiko dan kerentanan. Kemiskinan sering terkait dengan risiko, misalnya: Risiko bencana alam (banjir, kekeringan, gempa); Risiko ekonomi (PHK, naiknya harga kebutuhan pokok); Risiko sosial (konflik, migrasi); dan Risiko kesehatan (wabah penyakit). Strategi perlu mencakup *shock-responsive social protection*.
6. Keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi/program yang dijalankan untuk kemudian memutuskan keberlanjutan dengan memperhitungkan dampak jangka panjang. Beberapa pertanyaan dalam evaluasi program/strategi adalah; Apakah strategi akan tetap efektif setelah program selesai? Apakah strategi menciptakan ketergantungan atau kemandirian? Apakah ada dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang?

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, beberapa hal yang bisa disimpulkan dan direkomendasikan adalah bahwa inflasi memiliki dampak nyata terhadap kemiskinan ekstrem baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa dampak utamanya adalah; a. Penurunan daya beli; b. Peningkatan jumlah penduduk miskin ekstrem; c. Akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan; d. Kerentanan terhadap guncangan ekonomi; e. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Terkait hal ini, yang bisa direkomendasikan adalah Pemerintah Kabupaten Bandung perlu lebih memperhatikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, inflasi yang tinggi tanpa perlindungan sosial yang memadai akan memperburuk kondisi kemiskinan ekstrem, baik dari sisi jumlah maupun tingkat kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dan kebijakan perlindungan sosial sangat penting untuk menekan dampak negatif inflasi terhadap kelompok rentan (miskin ekstrem).

Kabupaten Bandung memiliki empat pilar sebagai strategi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu; a) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat; b) Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin; c) Mengurangi Kantong Kemiskinan ; d) Menata Tata Kelola Program Secara Terpadu. Keempat strategi ini menunjukkan hasil yang cukup baik, namun Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memikirkan strategi untuk menghilangkan hambatan sosial dan pemberdayaan Perempuan sebagaimana yang pernah disarankan oleh World Bank dalam penanggulangan kemiskinan. Kedepannya jika Kabupaten Bandung ingin menyusun strategi penanggulangan kemiskinan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah; a) Pemahaman mendalam tentang profil kemiskinan; b) Menganalisis penyebab utama kemiskinan; c) Data yang

Akurat dan Terverifikasi; d) Ketersediaan sumber daya; e) Analisis risiko dan kerentanan dan f) Keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afrizal. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Depok: Rajagrafindo Persada
- Ali Khomsan dkk. (2015). Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Amanatun Nisfah Nurun N dkk. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Keterbelanjaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Makro. Hasil Penelitian LP2M IAI Darul A'mal Lampung
- Andi Lopa Ginting. (2023). Mengukur Dampak Pendidikan, Pengangguran, Pengeluaran Perkapita, Inflasi terhadap Kemiskinan dan Gini Ratio di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 348-361
- Barro R. J. (1995). Inflation and Economic Growth, NBER Working Paper 5326
- Boediono. (2008). Ekonomi Moneter Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- BPS Pusat.(2024). Presentasi Penduduk Miskin dan Miski Ekstrem di Indonesia 2022-2024. <http://www.bps.go.id>
- BPS Kab. Bandung. (2024). Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung <http://www.bandungkab.bps.go.id>
- Creswell, J.W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition, SAGE Publications, Inc., London
- David, Fred. (2016). Manajemen Strategik. XV. Jakarta: Salemba Empat
- Desrini Ningsih & Puti Andiny. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 2, No. 1, April 2018
- Eka Nurcahya & Mohammad Benny Alexandri (2020). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung. Jurnal Moderat Vol. 6 N0. 2
- Eriyanto. (2012). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. (Edisi Khusus Komunitas. Cetakan ke-3). Yogyakarta: LKiS Group Ginanjar, dkk. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten.
- Grant, Robert. (2021). Contemporary Strategy Analysis. New Jersey: John Willey and Sons
- Handayani, Elvira dkk. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara : Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 19 No 07 Hal 35-45. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Handika Permana dan Esti Pasaribu (2023). Pengaruh Inflasi, IPM, UMP dan PDRB terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera. Jurnal Ilmiah MEA, Vol. 7 N0.3
- Hastina Febriaty dan Nurwani. (2017). Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi

- Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. QE Journal Vol.06 - No. 03
Diakses tanggal 10 Maret 2022
- Itang. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. Takziya, 16(1), 1-30.
- Kartini,Sri. (2019). Mengenal Inflasi, Semarang:Mutiara Aksara
- Kumalasari, Merna. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah penduduk Terhadap Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal Economia Vol 9, No. 1 Februari 2015
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muh. Dulkiah dkk, 2024. Persepsi Masyarakat terhadap Program Prioritas Pemerintah Kab. Bandung pada Program Beasiswa Ti Nupati (Besti). Bandung : Fak Sospol UIN Sunan Gunung Djati
- Nasution, S. (2002). Metode Research (penelitian Ilmiah) : Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket
- Ningsih, Desrini dan Puti Andiny. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonometrika. Vol. 2 No. 1. hal 56-57
- Patton, Wendy and McMahon, Mary. (2017). Constructivism: what does it mean or counselling?. Career ‘‘approaches. Edited counselling: constructivist by Mary McMahon. Abingdon, Oxon, United Kingdom: Routledge.3-16.
- Salmen, Lawrence F. (1942) Reducing poverty: an institutional perspective / Lawrence F. Salmen. p. cm.-(Poverty and social policy series; no.1)
- Pikiran Rakyat.com. (2024). Artikel berjudul "Dadang Supriatna Minta ASN Bekerjasama Tangani 4 Masalah Besar di Kabupaten Bandung", selengkapnya dengan link: <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandungraya/pr-138250337/dadang-supriatna-minta-asn-bekerjasama-tangani-4masalahbesar-di-kabupaten-bandung?page=all>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Toto Mahendra dan Juardi (2024). Dampak Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. Bulletin of Economic Studies (BEST) Volume 4, Nomor 1, (2024). pp. 58-72
- Umar, Husein. (2013). Desain Penelitian Manajemen Strategik. II. Jakarta: Rajawali.
- Peraturan Perundangan**
- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022-2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Bupati No. 287 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2023-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung 2005-2025.

Website

https://www.google.com/search?q=hambatan+dalam+menangani+inflasi+dan+kemiskinan+di+kab+bandung&oq=hambatan+dalam+menangani+inflasi+dan+kemiskinan+di+kab+bandung&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjQzNTgzajBqMTWoAgiwAgHxBWOf67stVS5z&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<https://ppid.bandungkab.go.id/artikel/dinas-perdagangan-dan-perindustrian> pelaksanaan-operasi-pasar--beras-murah, 20 Maeret 2024.

<https://hibar.pgrikabupatenbandung.id/pemkab-bandung-gelar-bazar-ramadhan-1446-h> dan-launching-operasi-pasar-murah-2025/

<https://hibar.pgrikabupatenbandung.id/ketersediaan-pangan-di-kabupaten-bandung-kang> ds-untuk-tiga-bulan-kedepan-tidak-ada-hambatan/, berita daerah 1 april 2024

<https://langonsari.desa.id/artikel/2022/11/02/13-program-unggulan-bupati> bandung-untuk-mewujudkan-masyarakat-bedas

<https://www.opininews.com/nasional/2589/dadang-supriatna-tahun-2025-program-13> unggulan-bedas-akan-di-tingkatkan-dari-segi-anggaran.html

<https://kim.bandungkab.go.id/2024/07/04/inovasi-baru-pemkab-bandung-luncurkan-ki> pinter-bedas-untuk-menjaga-stabilitas-harga-kebutuhan-pokok/

<https://www.balebandung.com/inflasi-kab-bandung-desember-2024-terbaik-se-jawa-barat>

<https://dsda.jabarprov.go.id/postingan/pemdaproj-jabar-dukung-penyediaan-air> layak-aman-dan-murah-di-kabupaten-bandung 67b2c247c899d9624446a61d

Detiknews, "Pemkab Bandung Raih Predikat Pengendali Inflasi Daerah Terbaik Nasional" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7022921/pemkab> bandung-raih-predikat-pengendali-inflasi-daerah-terbaik-nasional.

Detik.com. (2024). Artikel detikjabar, "Tekan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Bandung Dapat Insentif Fiskal Rp 6,4 M" selengkapnya dengan link : <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-7028740/tekan-kemiskinan-ekstrem> pemkab-bandung-dapat-insentif-fiskal-rp-6-4-m